

Positioning Ideologi Partai Politik dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Bambang Hermanto

Universitas Airlangga

Email: bambang.hermanto-2017@fisip.unair.ac.id

Abstract

This article analyzes the ideological positioning of political parties in the formation of the Indonesian Adil Makmur Coalition in the Presidential Election in 2019. The 20% presidential threshold means political parties must form coalitions to support candidates in the Presidential Election in 2019. This study uses a qualitative approach. The method used in this study is media analysis and literature studies. Data collection techniques used are derived from primary data in the form of observations of the phenomena that occur and secondary data in the form of valid documentation. The results of the analysis show that political parties no longer make party ideology the basis for building coalitions. Islamic political ideology parties are in coalition with nationalist ideological political parties. The emergence of the catch-all party shows pragmatism and shifts the ideology of political parties in building the coalition. This proves the lack of commitment and weakening of the ideology of political parties from time to time. Political parties focus more on getting a share of power. The coalition of political parties based on pure political interests will only have an impact on the emergence of minority elite classes in power over the majority people class, where democracy cannot be fully implemented because elites are only concerned with power and the distribution of rations for fellow coalition parties. From the explanation above, it can be concluded that ideology cannot be used as an absolute political party preference. Because it is proven that the composition of the coalition is not always formed on the basis of ideology. This explains that the formation of coalitions is the basis of political interests that are non-ideological or office-seeking to get a share of power.

Keywords: *Indonesia Adil Makmur Coalition, Political Party, Positioning Ideology*

Abstrak

Artikel ini menganalisis positioning ideologi partai politik dalam pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Adanya presidential threshold 20% mengakibatkan partai politik harus berkoalisi untuk mengusung kandidat dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis media dan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari data primer yang berupa observasi atas fenomena yang terjadi dan data sekunder yang berupa dokumentasi yang valid. Hasil analisis menunjukkan bahwa partai politik tidak lagi menjadikan ideologi partai sebagai dasar dalam membangun koalisi. Partai politik ideologi Islam berkoalisi dengan partai politik ideologi nasionalis. Munculnya catch-all party menunjukkan pragmatisme dan menggeser ideologi partai politik dalam membangun koalisi. Hal ini membuktikan kurangnya komitmen dan melemahnya ideologi partai politik dari waktu ke waktu. Partai politik lebih fokus bagaimana mendapat bagian dari kekuasaan. Koalisi partai politik yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas, dimana demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebab elite hanya mementingkan kekuasaan dan pembagian jatah atas sesama partai yang berkoalisi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi tidak dapat dijadikan sebagai preferensi koalisi partai politik secara absolut. Karena terbukti bahwa komposisi koalisi tidak selalu dibentuk atas dasar ideologi. Hal tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau office-seeking untuk mendapat bagian dari kekuasaan.

Kata kunci: *Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Politik, Positioning Ideologi*

PENDAHULUAN

Mengaitkan demokrasi dengan partai politik tidak pernah putus dari berbagai perdebatan. Menurut Abraham Lincoln Presiden Amerika yang ke-16, *democracy is a government of the people, by the people, for the people* sehingga demokrasi lebih sering dikenal dengan sebutan pemerintahan rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang memungkinkan adanya praktik politik secara bebas dan setara di suatu negara. Data World Forum for Democracy tahun 2012 menyebutkan bahwa sampai saat ini ada 120 negara demokrasi dari 192 negara di dunia dan mencakup hingga 58,2 juta penduduk dunia telah menganut sistem demokrasi. Persoalannya, apakah demokrasi linier dengan pendekatan partai politik?

Demokrasi telah membawa partai politik dalam Politik Pemilu. Adanya ambang batas atau *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% jumlah suara sah partai berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakibatkan partai politik harus berkoalisi dalam mengusung kandidat dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Partai politik yang tidak ikut serta dalam koalisi untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tidak bisa menjadi peserta pemilu untuk periode berikutnya. Koalisi partai politik bukan sekadar untuk mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga menjaga eksistensi partai politik. Sehingga koalisi partai politik menjadi jalan untuk mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing.

Pada tahun 2014 dinamika partai politik di Indonesia menjelang dan sesudah pemilihan presiden dimaknai sebagai manifestasi dari model koalisi *office-seeking*. Karakteristik model koalisi *office-seeking* bersifat cair, tidak permanen. Hal ini seakan membenarkan adagium politik praktis yang menyatakan bahwa di dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abdi.

Peta aliansi politik di Indonesia mengalami perubahan sejak pasca Pemilihan Presiden 2014. Koalisi partai politik berubah, partai-partai politik yang semula bersikap oposan terhadap pemerintahan sebagian beralih menjadi partai pendukung pemerintah. Fenomena pasca Pemilihan Presiden 2014 setidaknya menunjukkan terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia.

Menanggapi hal ini, publik merespon atas sikap partai politik dan elitnya. Berdasarkan survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada bulan November 2017, kepercayaan publik terhadap

partai politik hanya 48%. Bahkan hasil survei Charta Politika pada bulan Agustus 2018, partai politik hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 32.5%.

Riset menarik juga dihadirkan oleh Paige Johnson Tan (2002) dalam tulisannya “*Anti-Party Reaction in Indonesia*” yang mencoba melakukan konfirmasi mengenai reaksi anti-partai di Indonesia. Dalam studinya itu, fenomena reaksi anti-partai yang tak terkendali menimbulkan delegitimasi terhadap partai dan demokrasi. Hal itu disebabkan karena pragmatisme politik yang melanda partai-partai politik di Indonesia.

Hermawan Sulistyono (Cahyono, 1999) mengatakan bahwa dengan tidak adanya partai pemenang mayoritas dalam pemilu mendatang, pada tataran negara memang akan diharuskan adanya koalisi atau aliansi atau bahkan sekadar asosiasi kepentingan antar partai. Ketiga jenis pertautan politik ini derajatnya berbeda. Per definisi, koalisi adalah penyatuan struktural dua partai atau lebih. Aliansi adalah penyatuan sebagian besar kepentingan di antara dua partai atau lebih dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Akan halnya asosiasi adalah persekutuan kepentingan tertentu dalam jangka waktu relatif lebih singkat.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2019 terdapat dua koalisi partai politik. Pertama, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo - Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak terlepas dari dinamika pasca Pemilihan Presiden 2014, partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut mengalami perubahan.

Koalisi Indonesia Adil Makmur adalah koalisi partai politik pendukung Prabowo - Sandi Uno dalam Pemilihan Presiden 2019. Partai pendukung meliputi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Koalisi Indonesia Adil Makmur mempunyai visi memperjuangkan keadilan sosial bukan hanya untuk sebagian orang tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Tidak mudah dalam membentuk koalisi karena setiap partai politik mempunyai kepentingan masing-masing. Adanya dugaan politik transaksional dalam menentukan kandidat yang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menjadi bagian dari dinamika tersebut. Selain itu kepentingan partai politik yang ingin mendapatkan *cocktail effect* dalam Pemilihan Legislatif. Bahkan jika kita lihat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur

memiliki ideologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana *positioning* ideologi partai politik dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, penulis menilai penting untuk menggambarkan secara gamblang dinamika partai politik dan *positioning* ideologi dalam pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Makalah ini terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dengan tahap pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam mengamati Koalisi Indonesia Adil Makmur, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis mengenai *Positioning* Ideologi Partai Politik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari data primer yang berupa observasi atas fenomena yang terjadi dan data sekunder yang berupa dokumentasi yang valid. Pengamatan terkait Koalisi Indonesia Adil Makmur diamati melalui media masa. Dokumentasi dalam bentuk sastra jurnal nasional dan internasional.

Validasi data dan temuan yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Keseluruhan proses analisis data melibatkan beberapa upaya untuk menginterpretasi data dalam bentuk teks atau gambar. Peneliti perlu menyiapkan data yang akan dianalisis untuk memahami dan menginterpretasi makna sebenarnya. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur

Terbentuknya koalisi partai politik dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan *platform* di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. *Platform* yang dimaksud termasuk dalam masalah agama, ekonomi dan kebangsaan. Tetapi, koalisi partai politik juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik yang strategis dan kemudian membagi-bagi kekuasaan.

Pedersen (2010) mengkaji dampak politik intra-partai pada perilaku koalisi partai politik. Analisisnya menunjukkan bahwa, di antara pihak yang dekat dengan pemerintah dalam hal kebijakan, mereka yang didominasi oleh kelompok partai parlementer lebih sering masuk mengikat koalisi legislatif daripada partai yang didominasi oleh organisasi partai nasional. Ini

menyiratkan bahwa kemampuan partai-partai untuk mengubah perwakilan parlemen menjadi pengaruh nyata pada keputusan parlemen dikondisikan oleh distribusi kekuatan internal mereka.

Koalisi Indonesia Adil Makmur terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak terbentuk dengan mudah. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara internal partai maupun eksternal partai. Kepentingan internal partai politik yang berbeda-beda atau bahkan bertabrakan antar partai politik membuat koalisi tersebut semakin sulit terbentuk, khususnya dalam hal ini kandidat calon wakil presiden.

Koalisi Indonesia Adil Makmur terdiri atas partai politik yang mempunyai konsep dan ideologi berbeda-beda. Jika melihat tipologi Duverger yang membagi dua bentuk konsep partai yaitu Partai Kader dan Partai Massa, maka dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur dapat diklasifikasikan bahwa yang merupakan Partai Kader adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). sedangkan yang merupakan Partai Massa adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai kader sendiri berbasis pada kaukus tertutup dari sejumlah individu yang menonjol atau memiliki status sosial yang tinggi (*elite*), memenuhi segala prasyarat dalam rangka pengumpulan dana, mobilisasi sumber daya, dan menyediakan jaminan perwakilan bagi kelas menengah atas. Dalam membangun koalisi, partai kader mempunyai mesin yang militan untuk mencapai tujuan partai. Tetapi partai kader juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa partner koalisi untuk mencapai tujuannya, sehingga sehebat apapun partai kader mau tidak mau harus berkoalisi.

Semua partai politik dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur sepakat mengukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019, tetapi berbeda dalam calon wakil presiden. Ini merupakan dinamika besar, posisi calon wakil presiden akan memberikan efek terhadap partai politik. Kursi calon wakil presiden menjadi objek rebutan partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Dua hari menjelang batas masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinamika partai politik dalam pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur belum berakhir. Tanda tanya besar justru berkutat seputar siapa sosok yang akan menjadi pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Kubu Prabowo Subianto masih memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengkalkulasi sosok calon wakil presiden. Selama ini ada tiga nama kuat yang mencuat di bursa calon wakil presiden. Mereka adalah Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, dan pendakwah

Ustadz Abdul Somad. Dua nama terakhir merupakan amanat Ijtima Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

Dalam konteks sosial-politik makro, politik nasional juga tengah dipengaruhi sentimen agama. Hal ini memicu tarik-menarik kepentingan dalam tubuh koalisi. Negosiasi Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi faktor sentral dinamika dalam pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Partai Demokrat memang tak terlalu ngotot mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Justru Partai Keadilan Sejahtera yang masih ngotot mendorong sembilan nama kandidat calon wakil presiden yang sebelumnya pernah ditawarkan ke Prabowo.

Dinamika perselisihan partai politik terjadi dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengirim sinyal mengejutkan di detik-detik akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dua hari jelang batas waktu pendaftaran di KPU, Partai Demokrat disinyalir bercerai dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Partai Demokrat tidak alami kecocokan karena menilai Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden dengan menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN. Nama Sandiaga Uno mencuat sebagai kandidat cawapres pendamping Prabowo.

Bagi Koalisi Indonesia Adil Makmur, masalah calon wakil presiden semakin rumit karena masuknya rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U). Berdasarkan hasil Ijtima Ulama muncul nama Salim Segaf al Jufri. Hal ini menambah kepercayaan diri PKS. Realita Koalisi Indonesia Adil Makmur lantas membuat PAN was-was. PAN tidak setuju Prabowo memilih cawapres dari kalangan partai politik. Bukan tidak mungkin PAN berpikir ulang untuk mendukung Prabowo. Karena itu, PAN menawarkan jalan tengah Ustadz Abdul Somad menjadi calon wakil presiden yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF untuk mendampingi Prabowo selain Salim Segaf Al Jufri.

Singkatnya, Prabowo menunjuk Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Keputusan tersebut sangat mengejutkan, karena Sandiaga Uno merupakan satu partai yang sama, serta tidak termasuk dalam daftar nama yang diajukan oleh partai-partai koalisi. Tetapi disini membuktikan bahwa koalisi merupakan kerjasama aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan bersama, baik melalui persepsi ancaman atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai jika partai politik bekerja secara terpisah. Penggunaan sumber daya bersama menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit kerja.

Partai politik mau tidak mau harus berkoalisi untuk mencapai tujuannya meskipun tidak semua tujuannya dapat tercapai 100%.

Partai politik ingin menempatkan kadernya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang diyakini akan terkena efek elektoral positif. Keuntungan ini yang dinilai menggiurkan bagi partai politik mana pun. Alhasil, lanjut partai-partai yang tidak terwakili sebagai calon presiden dan calon wakil presiden membutuhkan konsesi yang sepadan. Bentuknya bisa beragam, bisa bentuk *power sharing*, dukungan untuk melaksanakan kampanye atau konsesi lainnya. Bagaimanapun koalisi adalah sebuah keharusan partai politik untuk mendapatkan bagian dari kekuasaan.

Djuyandi (2011) menekankan bahwa selama koalisi partai politik didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat melalui mekanisme demokrasi, walaupun yang ada dalam koalisi adalah partai politik yang berbeda paham atau ideologi maka akan menghasilkan kinerja politik yang luar biasa. Akan tetapi, jika koalisi itu didasarkan pada kepentingan politik murni, walaupun yang berkoalisi partai politik yang memiliki ideologi yang sama maka akan menghasilkan kinerja politik yang buruk.

2. Pergeseran *Positioning* Ideologi Partai Politik Koalisi Indonesia Adil Makmur

Ideologi politik dijelaskan sebagai suatu paham tertentu yang digunakan untuk melingkupi semua usaha kondisi ideal tertentu. Ideologi disini dihubungkan dengan kekuasaan. Persoalan ideologi bagi partai politik adalah menjadi hal yang sangat krusial, mengingat dengan adanya ideologilah maka partai politik akan dapat memegang teguh janji yang diberikan pada masyarakat. Partai politik tanpa ideologi layaknya manusia yang tidak memiliki prinsip dalam hidupnya, mudah terombang ambing dan hanya cenderung melihat keuntungan atas apa yang diberikan, bukan kepada kebahagiaan ketika mampu memberikan sesuatu pada orang lain. Pragmatisme partai politik menjadi semakin menguat dan inipun menimbulkan kesan bahwa ideologi politik yang dianut oleh suatu partai menjadi hal tidak lagi penting.

Ideologi dapat menjadi instrumen untuk mencapai kekuasaan. Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan harus didahului dengan perdebatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang akan mengambil kekuasaan. Setelah proses pengambilan kekuasaan yang dilegitimasi dengan massa yang besar berhasil. Pemenang harus mewaspadaai sepenuhnya kemungkinan penggoyahan kekuasaan yang dilakukan oleh lawan perdebatan sebelumnya, maka

suka tidak suka penguasa harus menginstitusionalisasikan ideologi yang mereka punya dalam semua struktur kekuasaan yang dikuasainya. Inilah sebuah gambaran yang jelas melihat hubungan antara kekuasaan dengan ideologi.

Selain itu ideologi politik juga berpengaruh dalam hal keberhasilan komunikasi politik. Suatu pesan politik akan dipahami secara parsial oleh si penerima pesan jika ia tidak mengetahui ideologi politik dari si aktor politik yang menyampaikan pesan. Komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik akan dipahami dengan baik oleh konstituennya jika partai politik itu sendiri dengan terbuka menyampaikan ideologi politiknya dan konsisten dengan ideologi tersebut.

Pada bagian ini, penulis mencoba mendiskusikan peta pergeseran *positioning* ideologi partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Downs (dalam Noris, 1999) menyatakan bahwa setiap partai-partai yang berkontestasi dalam pemilu, memiliki daya mobilitas yang tinggi untuk melakukan pergeseran *positioning* ideologi, contohnya membuat kebijakan dengan menabrak atau mengenyampingkan rambu-rambu ideologi partai.

Bahkan, partai-partai politik dapat dengan mudah menempatkan diri di titik manapun dalam kontinum *positioning* ideologi, dengan maksud dan tujuan menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya. Partai-partai politik melakukan hal itu, dikarenakan para *elitenya* tidak terlalu peduli soal ideologi partai politik atau bagaimana seharusnya partai politik bertindak sesuai ideologinya. Mereka lebih dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan jangka pendek.

Muniz (2015) menginvestigasi bagaimana partai memanfaatkan dimensi politik ideologi (kiri) dan klientelisme (patronase terprogram) untuk bersaing secara elektoral dalam mengembangkan demokrasi. Ini mengusulkan teori utilitas gabungan, yang menunjukkan pemilu kompetitif terpolarisasi dalam memodernisasi pasar pemilu nasional memaksa pihak-pihak yang terprogram untuk bersatu dengan pihak-pihak clientelistic untuk mendapatkan akses ke pasar pemilu swasta regional. Analisis menunjukkan ideologi dan klientelisme beroperasi sebagai faktor independen yang menjelaskan keterkaitan politik dalam mengembangkan demokrasi. Interaksi dimensi-dimensi ini melalui koalisi elektoral, bagaimanapun, menunjukkan melemahnya ideologi dari waktu ke waktu dan kurangnya pola yang dapat dilihat pada tingkat clientelistic. Studi ini memberikan kontribusi untuk literatur dengan menyelidiki persaingan partai pada tingkat ideologis dan clientelistic. Ini juga berkontribusi pada penyempurnaan analitis dan metodologis konsep clientelism sebagai hubungan politik yang sistematis.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2019 *presidential threshold* berubah kembali menjadi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Koalisi partai dengan ideologi Islam yang diwakili oleh PKS dan PAN seolah-olah kembali muncul bersama dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang merupakan partai dengan ideologi nasionalis mengusung pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Pemilihan Presiden tahun 2019 semakin menunjukkan asumsi bahwa basis ideologis tidak lagi relevan dijadikan rujukan koalisi partai politik.

Heywood (2000) mengatakan bahwa koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama, baik melalui persepsi ancaman atau pengakuan bersama bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja sama secara terpisah, atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.

Jumlah partai mempengaruhi tujuan koalisi dan masing-masing aktor koalisi memiliki tujuan khusus. Dalam sistem dua partai, berkoalisi merupakan sistem pengecualian. Koalisi dalam sistem dua partai biasanya terikat dengan situasi internal atau eksternal yang membahayakan atau ketika dua partai tersebut menginginkan hal yang sama. Kemungkinan lain terjadinya koalisi dalam sistem dua partai adalah menyangkut koalisi isu-isu tertentu.

Sementara itu dalam sistem banyak partai tidak diperlukan koalisi jika salah satu partai memiliki suara mayoritas yang mutlak. Meskipun demikian, ada beberapa kasus bahwa partai pemenang memilih berkoalisi dengan partai lainnya untuk berbagi tanggung jawab kekuasaan, sebab koalisi dalam sistem multi partai memperkuat posisi partai di parlemen. Koalisi berfungsi memaksimalkan keuntungan, menginginkan satu hal, beberapa aktor menganggap kemenangan lebih berarti daripada yang lainnya dan ketika tidak menguntungkan ia keluar.

Koalisi partai politik dalam Pemilihan Presiden bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, bahkan beberapa pihak menganggap hal tersebut hingga saat ini masih diperlukan atau harus dilakukan, mengingat kecilnya peluang kandidat calon presiden dari sebuah partai mendapat suara mutlak dalam Pemilihan Presiden.

Menurut Macridis (dalam Amal, 2012), dalam kondisi yang berkembang partai politik menjadi sangat pragmatis, dikarenakan tidak lagi melibatkan masalah ideologis yang ketat sehingga faktor atau perdebatan ideologi semakin mengikis dan kabur. Di samping itu juga, basis

ideologi yang semakin luntur pemaknaannya oleh partai dan/atau *elitenya*, dikarenakan mereka lebih memfokuskan pada bagaimana meraih kekuasaan dan memenangkan pemilu. Sehingga dalam situasi seperti ini, menurut Kirchheimer akan menimbulkan fenomena pergeseran yang mendasari proses transformasi kepartaian dari partai ideologis ke bentuk *catch-all party*.

Katz dan Mair (2009) lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan utama partai-partai adalah menjaga kepentingan mereka dan untuk itu partai-partai politik besar dengan tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan platform politik dapat berkoalisi guna melanggengkan kepentingan mereka bersama untuk tetap berkuasa, yang kemudian dikenal sebagai *cartel party*.

Axelrod (1970) kemudian berasumsi bahwa partai politik memang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan akan tetapi dalam derajat tertentu juga harus mempertimbangkan tercapainya tujuan yang lebih esensial yaitu tercapainya cita-cita yang lebih ideal dalam bentuk kebijakan (*policy*), sehingga kemudian pendekatan Axelrod ini dikenal sebagai *policy seeking*.

Senada dengan Axelrod, Abram de Swaan (1973) mengemukakan bahwa tujuan partai politik adalah sesuatu yang lebih ideal dalam hal ini berbasis kepada ideologi. Maka basis pembentukan koalisi menurutnya adalah ideologi. Kekuasaan hanya alat untuk mencapai tujuan partai yaitu cita-cita ideologis. Ideologi kemudian diterjemahkan ke dalam sesuatu yang bersifat konkrit (*platform*). Kesamaan *platform* ini yang kemudian akan mengelompokkan partai-partai politik ke dalam sebuah koalisi.

Koalisi Indonesia Adil Makmur terdiri dari partai-partai politik yang memiliki ideologi berbeda-beda. Partai Gerindra merupakan partai massa dengan asas Pancasila dan UUD 1945 teridentifikasi sebagai partai ideologi nasionalis-sekuler dan posisi sebagai partai kiri. Partai Demokrat merupakan partai massa dengan asas Pancasila / Nasionalis – Religius teridentifikasi sebagai *catch-all party* dan posisi sebagai partai tengah. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai kader dengan asas Islam teridentifikasi sebagai partai ideologi Islam dan posisi sebagai partai kanan. Sedangkan Partai Amanat Nasional merupakan partai massa dengan asas Pancasila dan berakar pada moral agama teridentifikasi sebagai partai ideologi Islam dan posisi sebagai partai kanan.

Partai politik tidak lagi menjadikan ideologi partai sebagai dasar dalam membangun koalisi. Pergeseran *positioning* ideologi partai tersebut terjadi pada semua partai. Partai politik ideologi Islam berkoalisi dengan partai politik ideologi nasionalis. Hal tersebut terjadi karena adanya

presidential threshold, tetapi disamping itu juga terjadi karena partai politik lebih mengutamakan mencari massa dibandingkan memperjuangkan ideologi partai. Pergeseran *positioning* ideologi partai politik ini terjadi secara perlahan setelah Indonesia masuk era reformasi dengan sistem multi partai.

Terjadi pergeseran *positioning* ideologi partai politik dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergeser ketengah mendekati Partai Gerindra tetapi dengan tetap mempertahankan garis batas basis ideologis partai. Partai Gerindra membuka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanpa menggeser ideologi partai, tetapi mendekati ulama-ulama Islam nasional. Selain itu Partai Manat Nasional (PAN) kembali menjadi anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur setelah sebelumnya pernah masuk dalam bagian pemerintahan Jokowi. Kedua partai ideologi Islam tersebut sedikit mengesampingkan unsur ideologis dalam membangun koalisi.

Lalu pertanyaan yang muncul adalah apakah pergeseran *positioning* ideologi ke bentuk *catch-all party* merupakan suatu keharusan? Konsepsi *catch-all party* tentang pragmatisme dan rasionalitas yang bertumpu pada model untung-rugi telah menciptakan inkonsistensi tindakan partai dalam program dan kebijakan. Partai bersangkutan lebih mengutamakan tujuannya memenangkan setiap kontestasi politik. Ditambah lagi dengan dalil Downs yang menyatakan bahwa suatu partai dan *elitenya* harus memiliki keluwesan kebijakan untuk bergerak ke Kiri-Kanan, demi mencapai hasil yang maksimum (Klingemann, 2000).

Hal tersebut serupa dengan apa yang dikatakan Imawan (2004) bahwa lahirnya konsep *catch-all party*, sebenarnya didasari oleh kajian Downs tentang perspektif perilaku rasional. Ia berpendapat bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin mengutamakan prinsip-prinsip pragmatisme dan rasionalitas. Kehadiran *catch-all party* menawarkan suatu program dan kebijakan umum bukan menawarkan persoalan ideologis. Sehingga posisi dan fungsi partai politik mengalami perubahan fundamental dan mencairkan ketegangan antara “kubu kiri” dan “kubu kanan”. Format *catch-all party* juga menerima pluralisme, bersikap inklusif, dan non-sektarian serta lebih mengedepankan pengembangan secara horizontal, menampung berbagai isu dan agenda dari berbagai kalangan di masyarakat.

Adanya perbedaan ideologi partai politik dalam suatu negara tidak selamanya dapat menghambat proses politik dan upaya pencapaian tujuan nasional, sepanjang masing-masing partai memiliki kesadaran untuk mendahulukan pentingnya urusan bangsa dan negara dibandingkan dengan urusan-urusan yang sifatnya hanya menguntungkan kelompok dan dirinya

sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill bahwa rasa kebangsaan akan menciptakan sebuah kepentingan bersama, yang juga memberikan suatu kekuatan dasar yang memadukan warga negara yang pada akhirnya menurut pandangan Mill akan menciptakan suatu kondisi politik yang stabil “*nationality, as ‘a principle of sympathy’, a ‘feeling of common interest’, supplied the strong basis of cohesion amongst a citizenry which he saw as an essential condition of political stability*” (O’ Sullivan, 2000: p. 157).

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa ideologi tidak dapat dijadikan sebagai preferensi koalisi partai politik secara absolut. Karena terbukti bahwa komposisi koalisi tidak selalu dibentuk atas dasar ideologi. Koalisi partai politik yang berbeda ideologi pun dilakukan untuk mendapatkan bagian dari kekuasaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau *office seeking*.

Penekanannya adalah bahwa koalisi partai politik yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas *elite* minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas, dimana demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebab *elite* hanya mementingkan kekuasaan dan pembagian jatah atas sesama partai yang berkoalisi.

KESIMPULAN

Terbentuknya koalisi partai politik dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan *platform* di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. Tetapi koalisi juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya. Dinamika pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur sangat rumit dari waktu ke waktu hingga batas akhir penutupan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Setiap partai politik ingin kandidat yang diusung dalam pemilihan presiden adalah kadernya. Sebab ada efek elektoral yang bisa didapatkan partai politik. Meskipun demikian, partai politik tetap harus membentuk koalisi. Sebab setidaknya dengan membentuk koalisi akan mendapatkan bagian dari kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya pragmatisme partai politik. Adanya pergeseran *positioning* ideologi partai politik mengakibatkan ideologi tidak lagi menjadi landasan dalam membangun koalisi. Koalisi partai politik yang berbeda ideologi pun dilakukan untuk mendapatkan bagian dari kekuasaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau *office seeking*. Namun akibat pergeseran *positioning* ideologi yang tidak lagi menjadi landasan dalam membentuk koalisi, maka perbedaan ideologi bukan lagi menjadi permasalahan partai politik.

Tetapi koalisi partai politik yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas *elite* minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas, dimana demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebab *elite* hanya mementingkan pembagian kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. (2012). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Axelrod, R. (1970). *Conflict of Interest*. Chicago: Markham.
- Cahyono, R. H. (1999). Menahan laju Golkar dan Habibie. Diakses dari <http://jurnal.wordpress.com/1999/05/25/menahan-laju-golkar-dan-habibie-2/>
- De Swaan, Abram. (1973). *Coalition Theories and Cabinet Formations*. Amsterdam: Elsevier.
- Djuyandi, Yusa. (2011). Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme. *Jurnal Humaniora Vol. 2 No. 2*
- Heywood, Andrew. (2000). *Key Concept in Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Imawan, Riswandha. (2004). *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*. Yogyakarta: Naskah pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM.
- Jatmika, Sigit. (2000). *Partai, Kebijakan dan Demokrasi* (Klingemann, Hans Dieter, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katz, Richard S. dan Mair, Peter. (2009). *The Cartel party Thesis: A Restatement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muniz, Cássio da Silva. (2015). *Ideology Versus Clientelism: Modernization And Electoral Competition In Brazil*. Published by ProQuest LLC.
- Noris, Pippa. (1999). "New Politicians? Changes in Party Competition at Westminster" dalam *Critical Elections: British Parties and Voters in Long-Term Perspective*. London: SAGE Publication Ltd.
- O'Sullivan, N. (2000). *Political theory in transition*. London: Routledge.
- Pedersen, Helene, Helboe. (2010). How intra-party power relations affect the coalition behaviour of political parties. *Journal Party Politics* SAGE Pub.
- Tan, Paige Johnson. (2002). Anti-Party Reaction in Indonesia: Causes and Implications. *Journal of Contemporary Southeast Asia Vol. 24, No. 3*

World Forum for Democracy. (2012). Bridging the Gap Democracy between Old Models and New Realities. Strasbourg: Council of Europe.